



MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MATARAM

Evva Junita Rahman¹, Baiq Nindria Riguna Umarta², Gibran Ardiansyah³, Sahri⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia.

¹evajunita@gmail.com

²baiqnindria@gmail.com

³reminzzy@gmail.com

⁴sahri.feb@unram.ac.id

Article Info

Received: 12 June 2025

Revised: 16 Juni 2025

Accepted: 17 Juni 2025

Abstrak: Membahas upaya peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rendahnya kesadaran menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) belum tergali secara optimal. Penelitian ini menganalisis tiga aspek utama yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak: sosialisasi dan edukasi, aksesibilitas layanan, dan perilaku serta kesadaran individu. Metode kegiatan meliputi observasi, perencanaan program (sosialisasi langsung, media cetak dan digital, layanan SAMSAT keliling), dokumentasi, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan strategi dan implementasi program pengabdian masyarakat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Mataram, sehingga berkontribusi pada peningkatan PAD dan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sosialisasi, Edukasi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

***Corresponding Author:**

Evva Junita Rahman,

Jurusan Ekonomi

Pembangunan, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Mataram, Kota Mataram,

Indonesia;

Email:evajunita028@gmail.com

Abstract: This community service journal details a program to enhance motor vehicle tax compliance in Mataram City, West Nusa Tenggara, Indonesia. Low taxpayer awareness hinders optimal regional revenue generation from this sector. The study analyzes three key aspects influencing taxpayer compliance: socialization and education, service accessibility, and individual behavior/awareness. The methodology involved observation, program planning, implementation (direct socialization, print and digital media, mobile SAMSAT services), documentation, and quantitative/qualitative evaluation. The findings aim to provide effective community service strategies to improve taxpayer awareness and compliance, contributing to increased regional revenue and development.

Keywords: Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax (PKB), Regional Original Revenue (PAD), Socialization, Education, Mataram City, West Nusa Tenggara, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kota Mataram, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami pertumbuhan pesat yang ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Pertumbuhan ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, realitanya, potensi PAD dari sektor PKB di Kota Mataram belum tergali secara optimal. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap ketersediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat Kota Mataram (Haryadi et al., 2019).

Rendahnya kesadaran wajib pajak PKB di Kota Mataram bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari permasalahan yang lebih kompleks yang melibatkan beberapa faktor saling berkaitan (Aryani et al., 2024). Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama:

- 1.1. Aspek Sosialisasi dan Edukasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif dan inovatif menyebabkan sebagian besar masyarakat kurang memahami pentingnya membayar PKB, mekanisme pembayaran, dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Sosialisasi yang ada seringkali bersifat formal dan kurang menjangkau masyarakat luas, terutama kalangan muda dan masyarakat di daerah terpencil (Fatikasari et al., 2024).
- 1.2. Aspek Aksesibilitas Layanan: Kesulitan akses layanan perpajakan, baik secara fisik maupun digital, juga menjadi kendala. Beberapa wajib pajak mungkin menghadapi kendala jarak, waktu, dan birokrasi yang rumit dalam proses pembayaran PKB. Sistem online yang ada mungkin belum sepenuhnya user-friendly dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat .
- 1.3. Aspek Perilaku dan Kesadaran: Aspek ini menyangkut perilaku dan kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, serta kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara, menyebabkan beberapa wajib pajak menunda atau bahkan menghindari kewajiban membayar PKB.

Peningkatan kesadaran wajib pajak PKB di Kota Mataram bukan hanya sekadar upaya meningkatkan PAD, melainkan juga merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak PKB harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Jurnal ini akan membahas strategi dan implementasi program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut (Pkb et al., n.d.).

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk menuntaskan masalah terbagi menjadi beberapa tahapan program kerja mulai dari persiapan hingga evaluasi akhir. Berikut uraian metode pelaksanaan program kerja yang dilakukan:

Metode observasi

Metode observasi dalam konteks meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas pelayanan pajak di lokasi seperti kantor SAMSAT dan layanan SAMSAT keliling. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai perilaku wajib pajak saat melakukan pembayaran, tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak, serta kendala yang mereka alami selama proses pelayanan. Teknik observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana pengamat turut serta dalam kegiatan pelayanan, maupun non-partisipatif, yaitu hanya mengamati tanpa ikut terlibat langsung. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang perlu diperbaiki, seperti kenyamanan tempat, kecepatan layanan, sikap petugas, dan kemudahan prosedur yang berpengaruh pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Data hasil observasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kualitas pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode Perencanaan Program

Metode perencanaan program untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram dimulai dengan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi wajib

pajak serta tingkat pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan. Selanjutnya, materi sosialisasi dan edukasi disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik wajib pajak agar mudah dipahami dan relevan, misalnya berupa panduan praktis pembayaran pajak, informasi tentang aplikasi pembayaran online, serta manfaat membayar pajak tepat waktu. Penjadwalan kegiatan sosialisasi diatur secara terstruktur dengan menentukan waktu dan tempat yang strategis, seperti kantor SAMSAT, desa-desa, dan lokasi layanan SAMSAT keliling, agar dapat menjangkau target peserta secara efektif. Selain itu, perencanaan juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah, aparat desa, dan komunitas kendaraan bermotor, untuk mendukung pelaksanaan program. Tahap ini juga mencakup penentuan metode penyampaian materi, seperti seminar, workshop, penyuluhan langsung, dan penggunaan media digital, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik dan interaktif. Dengan perencanaan yang matang, program sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka sehingga mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Metode Pelaksanaan Program

Metode pelaksanaan program untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dirancang agar efektif menjangkau masyarakat luas. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan penyuluhan langsung secara tatap muka di tempat-tempat strategis seperti kantor SAMSAT, desa-desa, dan lokasi umum yang ramai dikunjungi masyarakat (Fatikasari, 2023). Sosialisasi dapat dilakukan secara formal melalui lembaga resmi dan instansi terkait serta secara langsung dengan masyarakat tanpa perantara, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan interaktif.

Selain penyuluhan langsung, metode pelaksanaan juga melibatkan penyebaran informasi melalui media cetak seperti leaflet dan brosur, serta media elektronik dan digital, termasuk media sosial, untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan generasi muda yang lebih aktif di dunia maya. Layanan SAMSAT keliling dan sistem pembayaran pajak berbasis aplikasi mobile juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sekaligus memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Pelaksanaan program sering kali juga melibatkan kegiatan door-to-door, yaitu kunjungan langsung ke rumah wajib pajak yang menunggak untuk memberikan informasi dan mengingatkan kewajiban pembayaran pajak. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mendorong mereka untuk segera melunasi pajak kendaraan bermotor.

Seminar dan diskusi tatap muka juga menjadi bagian dari metode pelaksanaan, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai manfaat dan prosedur pembayaran pajak, termasuk penggunaan aplikasi pembayaran online. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mengubah persepsi masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam kegiatan meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram dilakukan dengan mengumpulkan dan menyimpan berbagai bentuk data yang berkaitan dengan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi pajak. Dokumentasi ini meliputi pengambilan foto dan video selama proses sosialisasi, rekaman kegiatan pelatihan atau seminar, serta pencatatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, dokumentasi juga mencakup pengumpulan testimoni dan umpan balik dari wajib pajak yang menjadi peserta sosialisasi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan perubahan sikap mereka

terhadap kewajiban perpajakan. Semua dokumen dan data yang terkumpul diarsipkan secara sistematis untuk memudahkan analisis dan pelaporan hasil kegiatan, serta menjadi referensi dalam perencanaan program sosialisasi berikutnya.

Metode Evaluasi

Metode evaluasi dalam kegiatan meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan mengukur pencapaian target penerimaan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi. Evaluasi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk melihat apakah terdapat peningkatan yang signifikan sebagai dampak dari program yang dijalankan. Metode evaluasi ini dapat menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang menilai konteks pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai (Kepatuhan et al., 2025). Hasil evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mengidentifikasi kendala dan faktor penghambat yang perlu diperbaiki agar program selanjutnya lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan data dan fakta lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang yang dilaksanakan di BAPPENDA Provinsi NTB selama kurang lebih empat bulan memberikan pengalaman langsung dalam memahami proses pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Mahasiswa ditempatkan pada bidang Perencanaan dan Pengembangan. Adapun hasil kegiatan yang diperoleh selama pelaksanaan magang:

Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan 4 tahun 2024

Pada triwulan keempat tahun 2024, BAPPENDA Provinsi NTB mengadakan rapat evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Rapat ini bertujuan untuk menilai pencapaian target pendapatan daerah, efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang (Amalia et al., 2023).

Dalam rapat evaluasi tersebut, seluruh bidang dan unit pelaksana teknis di lingkungan BAPPENDA NTB turut berpartisipasi aktif, termasuk perwakilan dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan agen Samsat. Diskusi difokuskan pada capaian indikator kinerja utama (IKU), realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta inovasi pelayanan seperti e-Samsat Delivery yang terus dioptimalkan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan kepada wajib pajak.

Selain itu, rapat juga membahas kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar bidang, dan hambatan teknis dalam pemungutan pajak. Berbagai rekomendasi dan strategi perbaikan disepakati, termasuk peningkatan sinergi antar unit, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Rapat evaluasi kinerja triwulan 4 ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa target pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB. Hasil rapat juga menjadi dasar penyusunan perencanaan dan program kerja tahun berikutnya agar lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan yang ada.

Dengan demikian, kegiatan rapat evaluasi ini mencerminkan komitmen BAPPENDA NTB dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah demi kemajuan Provinsi NTB secara keseluruhan.



Gambar 1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2024

Survei Harga Kendaraan

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB dalam mengelola pendapatan daerah, khususnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, penulis mengikuti kegiatan survei harga kendaraan yang dilaksanakan oleh Bidang Dalbin BAPPENDA NTB. Survei ini bertujuan untuk menentukan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang akurat dan sesuai dengan harga pasar di wilayah NTB.

Pelaksanaan survei harga kendaraan melibatkan tim khusus yang melakukan pengumpulan data harga pasaran umum atas berbagai jenis kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat. Data yang diperoleh dari survei ini menjadi dasar dalam penetapan NJKB yang digunakan sebagai acuan penghitungan pajak kendaraan bermotor. Penetapan NJKB yang tepat dan akurat sangat penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah tanpa memberatkan wajib pajak (Adolph, 2016).

Selain survei harga kendaraan, BAPPENDA NTB juga mengembangkan inovasi pelayanan seperti e-SAMSAT NTB yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui ATM Bank NTB. Inovasi ini sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah (MUHAMMAD, 2023).

Melalui kegiatan survei harga kendaraan ini, BAPPENDA NTB dapat memastikan bahwa nilai jual kendaraan yang digunakan dalam perhitungan pajak selalu mengikuti dinamika pasar, sehingga penerimaan pajak daerah dapat terjaga secara optimal dan adil bagi masyarakat.

Survei ini penting karena tren penjualan kendaraan di NTB memengaruhi penerimaan pajak daerah, dan data harga kendaraan yang akurat menjadi dasar penyesuaian tarif pajak serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Survei harga kendaraan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut Ombudsman Provinsi NTB untuk memastikan pelayanan pajak kendaraan berjalan sesuai ketentuan dan transparan.



Gambar 2. Survei Harga Kendaraan Bermotor di BrawijayaMoto

Perjalanan Dinas ke UPT Gerung dan Tanjung

Sebagai bagian dari kegiatan magang dan pemahaman langsung terhadap operasional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB, penulis mengikuti perjalanan dinas ke Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Gerung dan Tanjung. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di tingkat unit pelaksana teknis yang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah (Zulkieflimansyah et al., 2022).

Selama perjalanan dinas, tim BAPPENDA melakukan kunjungan ke UPTB Gerung dan Tanjung untuk mengevaluasi kinerja, mempererat koordinasi, serta membahas berbagai permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memberikan pembinaan kepada petugas di UPTB agar pelaksanaan tugas pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan ini mendukung penguatan sinergi antar unit dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah (Pengantar, 2022).

Di UPTB Gerung, tim juga menindaklanjuti beberapa isu terkait pengelolaan dana operasional yang sempat menjadi perhatian, sehingga perjalanan dinas ini memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di unit pelaksana teknis (Rani Mutiawati et al., 2023). Sementara di UPTB Tanjung, fokus pembinaan lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan dan inovasi dalam pemungutan pajak serta pengembangan sistem administrasi yang mendukung kelancaran operasional (Saleh & Hasri, 2023).

Perjalanan dinas ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam memahami dinamika pengelolaan pendapatan daerah di tingkat unit pelaksana teknis, sekaligus memperkaya wawasan tentang pentingnya koordinasi dan pengawasan dalam mendukung tugas BAPPENDA Provinsi NTB secara keseluruhan.



Gambar 3. Perjalanan Dinas BAPPENDA Provinsi NTB ke UPT-UPT

Workshop Penyusunan PERGUB Keringanan PKB bagi Penyandang Disabilitas

BAPPENDA Provinsi NTB menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terealisasi secara optimal merupakan salah satu kunci untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik (Rani Mutiawati et al., 2023).

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disatu sisi menjadi tantangan besar bagi seluruh daerah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang Makmur dan Mendunia (Negara, 2025).

Berbagai program unggulan dan kegiatan strategis yang menjadi bagian dari visi dan misi tersebut harus dapat dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan anggaran yang proposional dan tepat sasaran.

Untuk itu, Kepala BAPPENDA Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Bersama tim secara intensif terus melakukan kajian dan pembahasan terkait berbagai potensi peningkatan pendapatan daerah dalam APBD perubahan TA 2025, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (Yuliati, 2025).



Gambar 4. Workshop Penyusunan PERGUB Keringanan PKB bagi Penyandang Disabilitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sosialisasi dan edukasi, aksesibilitas layanan, dan perilaku serta kesadaran individu. Program yang terintegrasi, meliputi sosialisasi langsung, media digital, dan layanan SAMSAT keliling, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Namun, perlu adanya evaluasi berkelanjutan dan strategi yang lebih inovatif untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat, terutama generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Penetapan NJKB yang akurat dan sistem online yang user-friendly juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program jangka panjang.

Saran

- Penguatan Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi perlu lebih inovatif dan interaktif, memanfaatkan media digital secara maksimal, serta melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat. Materi sosialisasi harus mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik setiap segmen masyarakat.
- Peningkatan Aksesibilitas Layanan: Pengembangan sistem online yang lebih user-friendly dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat sangat penting. Layanan SAMSAT keliling perlu ditingkatkan frekuensi dan jangkauannya. Penyederhanaan prosedur administrasi juga perlu dilakukan.
- Penguatan Perilaku dan Kesadaran: Kampanye yang menekankan manfaat membayar pajak bagi pembangunan daerah perlu digencarkan. Pendekatan edukatif dan persuasif lebih efektif daripada pendekatan represif. Pemanfaatan media sosial dan influencer dapat menjadi strategi efektif.
- Evaluasi Berkelanjutan: Evaluasi program secara berkala sangat penting untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Data kuantitatif dan kualitatif perlu dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif.
- Kerjasama Antar Instansi: Kerjasama yang erat antara BAPPENDA, pemerintah daerah, kepolisian, dan komunitas masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program jangka panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait yang telah kebersamai dan membantu dalam penyusunan dan penyelesaian jurnal pengabdian yang berjudul “Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Mataram” ini. Banyak terimakasih kami ucapkan kepada BAPPENDA Provinsi NTB, khususnya bidang Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG) yang telah menerima kami sebaik-baiknya dari awal hingga akhir program magang/praktik kerja. Semoga silaturahmi dan kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 1–23.
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Aryani, R. A. I., Shelia, B., Azzahra, R., & Kunci, K. (2024). *Pengaruh Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Gerung*. 10, 663–669.
- Fatikasari, N. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan , dan diguna*. 1(3), 23–35.
- Fatikasari, N., Khotmi, H., & Rusdi, R. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 662–673. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.88>
- Haryadi, W., Kamaruddin, K., & ... (2019). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi & ...*, 7(2), 212–221. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/538%0Ahttp://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/download/538/786>
- Kepatuhan, T., Pajak, W., Di, B., & Mataram, K. (2025). *Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | ISSN : 2621-3982 EISSN : 2722-3574 PENGARUH PENERAPAN SAMSAT KELILING , SAMSAT DRIVE THRU , DAN Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | ISSN : 2621-3982 EISSN : 2722-3574*. 1, 337–355.
- MUHAMMAD, Y. (2023). ... *Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kepada Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/6406>
- Negara, B. (2025). *fun\$ji*,. 19.
- Pengantar, K. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Perform Report 2021*. 22.
- Pkb, B., Kecamatan, D. I., & Kabupaten, P. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN TIMUR*. 3(2), 176–190.
- Rani Mutihawadi, M. Ariy Dermawan S, & Iving Arisdiyoto. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2220–2224. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5291/http>
- Saleh, M., & Hasri, D. A. (2023). Analisis Kinerja Pemungutan Dan Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Sumbawa. ... *Seminar Nasional Manajemen Inovasi*, 6(2).

<https://conference.uts.ac.id/index.php/SEMAI/article/download/816/519>

Yuliati, D. (2025). *DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DI BAPPEDA PROVINSI NTB : IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK IMPACT BUDGET EFFICIENCY POLICY IN BAPPEDA NTB PROVINCE : IMPLICATIONS FOR PUBLIC SERVICE*. 10(1).

Zulkieflimansyah, Z., Nurjihadi, M., Hasri, D. A., Ananda, N. A., & Hakim, L. (2022). Proyeksi Dinamika Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Maneksi*, 10(2), 231–245. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i2.797>.